



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Studi Implementasi Otonomi Dan Desentralisasi Pemerintah Kota Bandung Dalam Konvergensi Pencegahan Stunting

Study of the Implementation of Autonomy and Decentralization of the Bandung City Government in the Convergence of Stunting Prevention

Devano Naufall Akbar¹, Muhammad Ghifari Arfananda², Subhan Saladin³, Rudiana⁴

¹ Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, devano23002@mail.unpad.ac.id

² Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, muhammad23079@mail.unpad.ac.id

³ Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, subhan23001@mail.unpad.ac.id

⁴ Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, subhan23001@mail.unpad.ac.id

***Corresponding Author: E-mail: devano23002@mail.unpad.ac.id**

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 18 Nov, 2024

Revised: 21 Dec, 2024

Accepted: 29 Jan, 2025

Kata Kunci:

Otonomi daerah;

Desentralisasi;

Konvergensi;

Pencegahan stunting;

Kota Bandung

Keywords:

Regional autonomy;

Decentralization;

Convergence;

Stunting prevention;

Bandung City

ABSTRAK

Otonomi daerah dan desentralisasi telah menjadi instrumen penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi otonomi dan desentralisasi oleh Pemerintah Kota Bandung dalam mengintegrasikan program pencegahan stunting melalui pendekatan konvergensi. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis data sekunder dari laporan pemerintah, regulasi, dan wawancara dengan pemangku kepentingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bandung berhasil mengoptimalkan desentralisasi melalui kolaborasi lintas sektor, termasuk Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan organisasi masyarakat. Implementasi program konvergensi, seperti penyediaan layanan gizi, edukasi kesehatan, dan perbaikan sanitasi, telah menunjukkan dampak signifikan terhadap penurunan prevalensi stunting dari 26,4% pada 2021 menjadi 12,4% pada 2024. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan kesenjangan koordinasi antar-tingkat pemerintahan. Kesimpulannya, otonomi dan desentralisasi yang terarah dapat memperkuat upaya pencegahan stunting, tetapi diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan dan perencanaan yang lebih integratif untuk mencapai keberlanjutan.

ABSTRACT

Regional autonomy and decentralization have become important instruments in supporting governance that is responsive to community needs. This study aims to examine the implementation of autonomy and decentralization by the Bandung City Government in integrating stunting prevention programs through a convergence approach. The research methodology used a qualitative approach with secondary data analysis from government reports, regulations, and interviews with stakeholders. The results showed that the Bandung City Government successfully optimized decentralization through cross-sector collaboration, including the Health Office, Education Office, and community organizations. The implementation of convergence programs, such as nutrition service provision, health education, and sanitation improvement, has shown a significant impact on reducing stunting prevalence from 26.4% in 2021 to 12.4% in 2024. However, the study also identified challenges, such as limited human resources and coordination gaps between levels of government. In conclusion, autonomy and purposeful decentralization can strengthen stunting prevention efforts, but institutional capacity building and more integrative planning are needed to achieve sustainability.

DOI: 10.56338/jks.v8i1.6764

PENDAHULUAN

Stunting merupakan kondisi di mana pertumbuhan anak terganggu, sehingga tinggi badan anak lebih rendah dari standar sesuai usianya. Hal ini disebabkan oleh masalah gizi kronis yang terjadi akibat kekurangan asupan nutrisi dalam jangka waktu yang panjang. Di Indonesia, stunting masih menjadi persoalan utama yang membutuhkan perhatian serius dari semua pihak. Oleh karena itu, pemerintah telah menetapkan penanganan stunting sebagai salah satu program prioritas nasional. Pendekatan penanganan yang terintegrasi diperlukan untuk menekan angka kasus dan mencegah peningkatan lebih lanjut.

Stunting terjadi pada anak balita dalam periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu masa kritis di mana anak mengalami gangguan pertumbuhan akibat kekurangan gizi kronis. Kondisi ini berdampak pada munculnya berbagai gangguan pertumbuhan dan perkembangan, menjadikan anak lebih rentan terhadap penyakit. Anak-anak yang mengalami stunting sering kali menunjukkan keterlambatan perkembangan otak dan tubuh. Secara fisik, stunting dapat dikenali melalui panjang atau tinggi badan anak yang lebih rendah dari standar nasional, yang dapat diperiksa melalui Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA). Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi mengurangi produktivitas saat dewasa dan meningkatkan risiko penyakit kronis. Lebih dari sekadar masalah pertumbuhan fisik, stunting juga menyebabkan anak lebih mudah sakit dan mengalami gangguan perkembangan otak serta kecerdasan. Oleh karena itu, stunting merupakan ancaman serius terhadap kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, stunting didefinisikan sebagai gangguan pada pertumbuhan dan perkembangan anak yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis serta infeksi berulang. Hal ini dapat diidentifikasi melalui tinggi atau panjang badan anak yang lebih rendah dari standar yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Permasalahan stunting berdampak signifikan pada kualitas sumber daya manusia, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka pendek, stunting dapat mengakibatkan hambatan pertumbuhan fisik pada balita, terganggunya perkembangan kognitif dan motorik, serta munculnya gangguan kesehatan lainnya. Sedangkan dalam jangka panjang, stunting berisiko menurunkan kapasitas intelektual individu dewasa, yang berimbas pada produktivitas kerja yang rendah. Selain itu, stunting juga berdampak pada fungsi saraf dan perkembangan sel otak, menyebabkan proses pembelajaran menjadi lambat. Bahkan, stunting meningkatkan risiko penyakit kronis seperti diabetes, jantung, stroke, hipertensi, serta obesitas di masa mendatang.

Kota Bandung, sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat, turut menghadapi tantangan ini meskipun telah terjadi penurunan angka prevalensi stunting secara nasional. Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Bandung telah menginisiasi berbagai kebijakan inovatif dalam pencegahan dan penanganan stunting. Program-program seperti Program Duta Cerdiku, Beas Beureum, dan Rembulan adalah wujud konkret dari strategi kebijakan yang berbasis kolaborasi lintas sektor. Kebijakan ini mencerminkan pendekatan pemerintahan yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Namun demikian, pertanyaan penting yang muncul adalah sejauh mana implementasi kebijakan ini efektif dalam menurunkan angka stunting secara signifikan?

Di Kota Bandung, prevalensi stunting menunjukkan tren penurunan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2020, angka stunting tercatat sebesar 28,12 persen, kemudian menurun menjadi 26,4 persen pada 2021, dan 19,4 persen pada 2022. Data terbaru hingga akhir Oktober 2024 menunjukkan prevalensi stunting mencapai 12,4 persen, melampaui target nasional sebesar 14 persen untuk tahun 2024.

Konteks implementasi kebijakan di Kota Bandung menghadirkan tantangan yang kompleks. Salah satu kendala utama adalah koordinasi antar pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah,

sektor swasta, hingga masyarakat sipil. Selain itu, keterbatasan pemahaman masyarakat tentang pentingnya asupan gizi dan pola pengasuhan anak masih menjadi hambatan utama. Dalam hal ini, seperti yang diungkapkan oleh Nelson Mandela, "Education is the most powerful weapon which you can use to change the world." Peningkatan kapasitas dan pengetahuan masyarakat menjadi salah satu kunci untuk mengubah pola pikir dan perilaku yang mendukung keberhasilan kebijakan.

Penelitian ini juga relevan dalam konteks perumusan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). Pengukuran efektivitas implementasi kebijakan stunting di Kota Bandung akan memberikan panduan bagi perbaikan kebijakan di masa depan. Studi ini menjadi penting tidak hanya bagi Pemerintah Kota Bandung tetapi juga bagi daerah lain yang menghadapi permasalahan serupa. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab kebutuhan akan inovasi kebijakan yang berkelanjutan dan kontekstual sesuai dengan karakteristik lokal.

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan studi implementasi kebijakan publik, khususnya pada isu kesehatan masyarakat. Dalam konteks akademis, isu stunting menjadi topik strategis karena melibatkan aspek multidisipliner seperti kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan rekomendasi strategis bagi pemerintah dalam meningkatkan efektivitas kebijakan yang telah berjalan.

Oleh karena itu, studi ini menempatkan fokus pada bagaimana strategi kebijakan Pemerintah Kota Bandung diimplementasikan, faktor-faktor yang mendukung keberhasilannya, dan tantangan yang harus diatasi. Dengan pendekatan yang komprehensif, penelitian ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan akan solusi strategis dalam menciptakan generasi masa depan yang sehat dan produktif.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan fenomena, peristiwa, dan situasi yang sedang berlangsung secara mendalam. Menurut Sugiyono (2013), metode deskriptif kualitatif bertujuan untuk mengkaji objek dalam kondisi alami, tanpa intervensi eksperimen. Dalam pendekatan ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama, sedangkan pengumpulan data dilakukan melalui teknik triangulasi atau kombinasi metode. Data yang terkumpul dianalisis secara induktif dan kualitatif, sehingga fokus utama penelitian terletak pada pemahaman makna dibandingkan pada upaya untuk membuat generalisasi. Pendekatan ini dirancang untuk mengidentifikasi, menjelaskan, dan memetakan masalah secara rinci, demi memperoleh wawasan yang lebih mendalam terkait individu, kelompok, atau peristiwa tertentu. Hasil akhirnya disajikan dalam bentuk deskripsi kata-kata yang mencerminkan kondisi nyata di lapangan.

Selain itu, penelitian ini mengintegrasikan kajian literatur sebagai metode tambahan penting dalam pengumpulan data. Kajian literatur tidak hanya digunakan untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, tetapi juga untuk menganalisis dan mensintesis secara kritis berbagai teks yang relevan. Sumber yang digunakan meliputi buku, jurnal, artikel ilmiah, dan publikasi akademik lainnya. Tujuan utamanya adalah tidak sekadar mengutip, tetapi juga menyarikan dan menafsirkan inti gagasan dari literatur yang ada. Pendekatan ini memungkinkan penarikan kesimpulan yang lebih tajam dan komprehensif terkait konsep-konsep utama yang dikaji, seperti yang diuraikan oleh Rudolf dalam Yusuf dan Khasanah (2019).

Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya membangun kerangka pemahaman yang lebih luas mengenai refleksi pendidikan, dengan mengacu pada perspektif filsafat idealisme dan pragmatisme. Perspektif tersebut dianalisis menggunakan sumber-sumber kredibel yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan menggabungkan berbagai sudut pandang, kajian literatur ini tidak hanya memperkaya pemahaman tentang teori-teori yang relevan, tetapi juga memberikan wawasan yang lebih mendalam terhadap isu-isu pendidikan yang sedang berkembang. Pendekatan ini

berkontribusi secara signifikan dalam merumuskan solusi yang aplikatif dan relevan untuk menghadapi tantangan nyata dalam dunia pendidikan masa kini

HASIL DAN PEMBAHASAN

Objek Penelitian

Objek penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan Pemerintah Kota Bandung dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting. Stunting, yang disebabkan oleh kurangnya gizi pada anak-anak sejak 1.000 hari pertama kehidupan, adalah masalah serius yang efeknya berdampak pada kualitas sumber daya manusia di masa depan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dapat mengatasi masalah ini. Pemerintah Kota Bandung telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan program inovatif, seperti Beas Beureum dan Rembulan, yang mengintegrasikan edukasi gizi, distribusi tablet tambah darah, serta pemberian makanan sehat di sekolah-sekolah.

Gambaran Umum Kota Bandung

Kota Bandung, sebagai ibu kota Provinsi Jawa Barat, memiliki posisi strategis baik dalam bidang pemerintahan maupun kesehatan. Sebagai kota besar yang berkembang pesat, Bandung menghadapi berbagai tantangan dalam mengelola kebijakan publik, terutama dalam memastikan kesehatan warganya. Pemerintah Kota Bandung terus berusaha merancang kebijakan yang mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan, sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan ekonomi dan sosial. Dalam konteks kebijakan publik, Bandung sering dijadikan contoh kota yang inovatif, dengan berbagai program berbasis teknologi dan partisipasi masyarakat.

Di bidang kesehatan, Kota Bandung menghadapi tantangan serius terkait peningkatan angka stunting, penyakit tidak menular, serta akses layanan kesehatan yang merata. Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Kesehatan telah mengerjakan berbagai program inovatif untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, seperti program pencegahan stunting dan peningkatan gizi. Selain itu, upaya untuk menanggulangi penyakit menular dan mengoptimalkan fasilitas kesehatan juga menjadi prioritas. Berbagai kebijakan yang mengintegrasikan sistem kesehatan digital, seperti layanan kesehatan berbasis aplikasi, telah diperkenalkan untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan.

Meskipun telah banyak terobosan dalam kebijakan kesehatan, tantangan terbesar yang dihadapi Kota Bandung adalah kesenjangan akses antara daerah perkotaan dan pinggiran kota. Meskipun pusat kota memiliki fasilitas kesehatan yang relatif memadai, wilayah-wilayah yang lebih terpencil masih kesulitan mendapatkan layanan yang setara. Oleh karena itu, pemerintah perlu merancang kebijakan yang tidak hanya memerhatikan wilayah tengah, tetapi juga memperhatikan kebutuhan masyarakat di daerah pinggiran, termasuk melalui program penguatan layanan kesehatan berbasis komunitas.

Secara keseluruhan, Kota Bandung berupaya untuk menjadi contoh bagi kota-kota lainnya dalam merumuskan kebijakan publik yang inklusif dan berbasis pada kebutuhan masyarakat. Walaupun tantangan yang dihadapi cukup besar, terutama dalam sektor kesehatan dan kesenjangan sosial, melalui kebijakan yang inovatif dan berkelanjutan, Bandung berkomitmen untuk terus memperbaiki kualitas hidup warganya dan menciptakan kota yang lebih sehat, cerdas, dan berdaya saing.

Dinas Kesehatan Kota Bandung

Dinas Kesehatan Kota Bandung merupakan salah satu perangkat daerah tipe A yang berperan penting dalam penyelenggaraan urusan kesehatan di wilayah Kota Bandung. Dengan visi besar mewujudkan "Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera, dan Agamis," dinas ini bertugas memastikan layanan kesehatan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Melalui berbagai program strategis, seperti Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat), serta inovasi teknologi dalam pelayanan kesehatan, dinas ini terus mendukung upaya peningkatan kualitas hidup warga Bandung.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Kesehatan memiliki fungsi utama sebagai perumus kebijakan kesehatan, pelaksana program kesehatan masyarakat, dan pengelola administrasi kesehatan. Institusi ini juga bertanggung jawab atas evaluasi dan pelaporan berbagai program kesehatan untuk memastikan keberlanjutannya. Sejak awal pendiriannya, Dinas Kesehatan telah menjadi tulang punggung pelaksanaan layanan kesehatan berbasis masyarakat di Kota Bandung.

Berpusat di Jl. Supratman No. 73, institusi ini menjalankan visi dan misinya sejalan dengan misi pembangunan Kota Bandung, termasuk mempromosikan masyarakat yang humanis, berdaya saing, dan mandiri, serta mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan efisien. Berbagai program seperti pemberdayaan posyandu, peningkatan pelayanan Puskesmas, serta digitalisasi data kesehatan merupakan bagian dari upaya Dinas Kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan produktif.

Peran Dinas Kesehatan Kota Bandung

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 yang mengubah Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Kesehatan Kota Bandung ditetapkan sebagai perangkat daerah dengan klasifikasi tipologi A. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Kesehatan memiliki tanggung jawab utama dalam menjalankan urusan pemerintahan di bidang kesehatan di wilayah Kota Bandung. Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan. Dinas sebagaimana dimaksud berdasarkan Perwal No 1381 Tahun 2016 berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Termaktub dalam Peraturan Walikota Bandung No 1381 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung :

1. Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.
2. Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang kesehatan.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan lingkup kesehatan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan lingkup kesehatan;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup kesehatan;
 - d. Pelaksanaan administrasi Dinas lingkup kesehatan; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kebijakan Wali Kota Bandung Dalam Penanganan Stunting

Penanganan stunting di Kota Bandung menjadi salah satu prioritas utama dalam kebijakan pemerintah kota, mengingat stunting merupakan masalah serius yang memengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang. Untuk menangani hal tersebut, Wali Kota Bandung mengeluarkan sejumlah kebijakan yang tertuang dalam Keputusan Wali Kota Nomor 800/Kep.549-DPPKB/2022 dan Keputusan Wali Kota Nomor 050/Kep.952-BAPPELITBANG/2020. Kebijakan ini tidak hanya mencakup pendekatan kesehatan, tetapi juga melibatkan sektor lain seperti pendidikan, sosial, dan ekonomi dalam rangka mengatasi akar masalah stunting yang lebih kompleks.

Keputusan Walikota Nomor 800/Kep.549-DPPKB/2022 menegaskan bahwa pencegahan dan penanganan stunting harus dilakukan secara terkoordinasi antara berbagai instansi pemerintah dan pihak terkait lainnya. Dalam kebijakan ini, program-program yang berfokus pada pemberian asupan gizi yang tepat kepada remaja dioptimalkan. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah dengan memperkenalkan program edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi yang seimbang melalui berbagai saluran, seperti posyandu, sekolah, dan media sosial.

Selanjutnya, Keputusan Wali Kota Nomor 050/Kep.952-BAPPELITBANG/2020 memberikan kerangka kerja untuk memperkuat integrasi antara kebijakan penanganan stunting dengan program-program pembangunan lainnya. Keputusan ini menekankan perlunya data yang akurat dan sistematis dalam pengumpulan informasi mengenai prevalensi stunting di berbagai wilayah Kota Bandung. Dalam kebijakan ini, Dinas Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan (Bappelitbang) diinstruksikan untuk melakukan pemetaan kebutuhan daerah dan menyusun rencana aksi yang berbasis pada data tersebut. Pemetaan ini sangat penting untuk menentukan prioritas wilayah yang membutuhkan intervensi lebih besar dan agar program-program yang dilakukan lebih terarah dan efisien.

Inovasi Dinas Kesehatan Kota Bandung Dalam Penanganan Stunting

Dinas Kesehatan Kota Bandung telah menunjukkan inovasi strategis dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting dengan fokus pada kelompok usia muda, yaitu anak-anak dan remaja. Salah satu program unggulan adalah Beas Beureum, yang dirancang untuk menanamkan kebiasaan makan sehat sejak dini pada siswa sekolah dasar. Program ini mengajak anak-anak sarapan bersama di sekolah dengan menu yang sesuai pedoman Isi Piringku, yang terdiri dari makanan seimbang dan bergizi. Selain bertujuan membentuk pola makan sehat, program ini juga secara khusus menyasar anak-anak perempuan, yang di masa depan akan menjadi calon ibu. Harapannya, ketika mereka dewasa, menikah, dan memiliki anak, kebiasaan makan sehat ini akan diterapkan dalam pola asuh mereka, sehingga risiko stunting pada generasi berikutnya dapat ditekan secara signifikan.

Namun, pelaksanaan Beas Beureum tidak luput dari tantangan. Salah satu kendalanya adalah kebiasaan anak-anak di Kota Bandung yang lebih menyukai jajanan kurang bergizi, seperti takoyaki, seblak, atau makanan berbahan dasar tepung lainnya. Tren makanan seperti ini menjadi penghalang utama dalam menanamkan kebiasaan makan sehat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih variatif untuk membuat edukasi gizi menjadi menarik bagi anak-anak. Misalnya, integrasi program

dengan media yang mereka sukai atau kompetisi antar sekolah untuk menu sehat dapat menjadi solusi efektif.

Selain Beas Beureum, Dinas Kesehatan juga menjalankan program Rembulan (Remaja Bandung Unggul Tanpa Anemia) yang menargetkan remaja SMP dan SMA, khususnya remaja putri. Program ini berfokus pada pencegahan anemia melalui edukasi pentingnya konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD). Salah satu kekuatan utama program ini adalah keterlibatan duta kesehatan remaja sebagai agen perubahan. Dengan pendekatan sebaya, informasi dan edukasi tentang anemia disampaikan oleh teman-teman mereka, yang membuat pesan lebih mudah diterima. Hasilnya sangat positif, dengan peningkatan konsumsi TTD dari 15% pada 2022 menjadi 70% pada 2024, meskipun pelaksanaannya sempat terganggu selama pandemi COVID-19.

Pelaksanaan program pencegahan stunting di Kota Bandung menghadapi beberapa kendala yang perlu diatasi untuk mencapai output yang optimal. Salah satu hambatan terbesar adalah dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan penutupan sekolah selama tahun 2020 dan 2021, sehingga program tidak dapat berjalan secara maksimal. Meskipun program mulai kembali dijalankan pada tahun 2023, tantangan baru muncul dalam bentuk keterbatasan akses ke sekolah swasta dan internasional yang mungkin memiliki pendekatan berbeda terhadap program pemerintah. Selain itu, memperluas cakupan program ke seluruh wilayah Kota Bandung membutuhkan waktu dan dukungan lintas sektor.

Pemanfaatan Teknologi Digital dan Pendekatan Berbasis Komunitas

Pemanfaatan teknologi digital dan pendekatan berbasis komunitas merupakan dua pilar utama dalam program pencegahan dan penanganan stunting yang dikerjakan oleh Dinas Kesehatan Kota Bandung. Dalam konteks ini, aplikasi e-Penting (Elektronik Pencatatan Stunting) menjadi alat yang sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pengumpulan dan pengolahan data terkait stunting. Aplikasi ini tidak hanya mempermudah pendataan, tetapi juga mengintegrasikan informasi dari berbagai sumber, sehingga memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kondisi gizi anak di Kota Bandung.

Salah satu keunggulan dari aplikasi e-Penting adalah kemampuannya untuk melakukan manajemen data secara terpusat. Dengan sistem yang terintegrasi, data mengenai status gizi anak dapat dikumpulkan dari tingkat posyandu hingga perangkat daerah, memungkinkan analisis yang lebih akurat dan cepat. Hal ini cukup penting dalam pengambilan keputusan kebijakan yang tepat sasaran. Misalnya, jika suatu wilayah menunjukkan angka stunting yang tinggi, intervensi dapat segera dilakukan dengan memberikan makanan tambahan atau dukungan kesehatan lainnya kepada keluarga yang membutuhkan.

Pendekatan berbasis komunitas juga sangat ditekankan dalam program ini. Dinas Kesehatan Kota Bandung melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk kader kesehatan, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi komunitas lainnya dalam upaya pencegahan stunting. Melalui kolaborasi ini, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat tetapi juga berperan aktif dalam mengidentifikasi dan membantu keluarga berisiko stunting. Misalnya, kader kesehatan dilatih untuk

memberikan edukasi tentang gizi seimbang dan praktik hidup sehat kepada masyarakat.

Strategi Digital dalam Penanganan Stunting di Kota Bandung

Kota Bandung telah mengadopsi pendekatan digital dalam upaya penanganan stunting melalui peluncuran aplikasi e-Penting. Aplikasi ini dirancang untuk menjadi platform utama dalam mengelola informasi stunting secara terintegrasi dan efisien. Masalah stunting, yang mencerminkan kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis, merupakan salah satu tantangan besar kesehatan masyarakat. Melalui e-Penting, proses pendataan, pengelolaan, dan analisis informasi stunting di Kota Bandung dilakukan secara lebih terstruktur, sehingga mendukung pemerintah dalam mengambil kebijakan berbasis data yang lebih tepat sasaran.

Salah satu fungsi utama e-Penting adalah kemampuannya untuk mengumpulkan dan mengelola data secara digital dari berbagai sumber, seperti posyandu, kader kesehatan, dan fasilitas kesehatan lainnya. Data yang terkumpul memberikan gambaran mendetail mengenai daerah atau kelompok yang membutuhkan perhatian khusus. Dengan sistem ini, pemerintah tidak hanya dapat memantau status gizi balita secara real-time, tetapi juga merancang intervensi yang lebih efektif, seperti distribusi makanan tambahan atau program pemberian edukasi gizi untuk keluarga yang berisiko.

Selain itu, aplikasi ini memainkan peran penting dalam proses monitoring dan evaluasi program-program stunting. Dengan adanya fitur pelacakan kemajuan secara berkala, e-Penting memberikan umpan balik yang penting bagi pemerintah untuk mengevaluasi efektivitas strategi yang telah dilaksanakan. Berdasarkan data yang disediakan, pemerintah Kota Bandung telah mencatat penurunan signifikan angka stunting, dari 26,4% di tahun 2021 menjadi 16,3% pada tahun 2023. Penurunan ini menjadi indikator keberhasilan integrasi teknologi dalam upaya penanganan stunting.

Keunggulan lainnya dari e-Penting adalah kemampuannya untuk mengintegrasikan berbagai pihak melalui kolaborasi multi-stakeholder. Pemerintah, masyarakat, akademisi, dan sektor swasta dapat berbagi data dan informasi melalui platform ini. Sebagai contoh, data yang disediakan aplikasi dapat membantu masyarakat dalam mengorganisir dukungan seperti penyediaan makanan tambahan untuk keluarga yang membutuhkan. Pendekatan kolaboratif ini memperkuat keterlibatan masyarakat, sehingga upaya penanganan stunting tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab bersama. Yang tidak kalah penting, aplikasi ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi publik. Informasi yang disampaikan melalui e-Penting meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencegahan stunting sejak dini. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat diharapkan dapat mengubah pola hidup menjadi lebih sehat, mulai dari kebiasaan makan hingga pengasuhan anak yang mendukung tumbuh kembang optimal.

Sinergi Teknologi dan Komunitas dalam Inovasi Kebijakan

Pemanfaatan teknologi dalam kebijakan publik telah menjadi salah satu pilar penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program pemerintah, terutama di bidang kesehatan. Dalam konteks penanganan stunting, Kota Bandung mengadopsi aplikasi e-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (ePPGBM), sebuah sistem digital yang dirancang untuk membantu Puskesmas

memantau status gizi anak-anak di wilayah kerjanya. Aplikasi ini memungkinkan Puskesmas untuk mencatat, melaporkan, dan memantau data balita secara lebih akurat dan cepat. Salah satu fitur penting dari ePPGBM adalah pemberitahuan otomatis berupa tanda lonceng ketika terdapat balita dengan status gizi rawan. Hal ini memberikan peringatan dini kepada tenaga kesehatan sehingga tindakan intervensi dapat segera dilakukan.

Keberadaan ePPGBM tidak hanya mempermudah proses pengelolaan data, tetapi juga mendorong surveilans gizi menjadi lebih terorganisir dan berbasis bukti. Data yang dihasilkan melalui aplikasi ini secara berkala dilaporkan ke Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), yang kemudian digunakan untuk evaluasi dan perencanaan program lanjutan. Selain itu, data yang dipaparkan dalam bentuk grafik dan laporan statistik melalui profil kesehatan Kota Bandung dapat diakses oleh pemangku kepentingan untuk memahami tren dan permasalahan gizi secara komprehensif. Dengan transparansi ini, kebijakan yang diambil menjadi lebih tepat sasaran dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat.

Keberhasilan teknologi ini tidak terlepas dari peran aktif komunitas. Pelibatan masyarakat, seperti kader posyandu dan tokoh lokal, sangat penting untuk memastikan data yang dimasukkan ke dalam sistem akurat dan representatif. Masyarakat berfungsi sebagai garda terdepan dalam mendeteksi kasus-kasus berisiko di lingkungannya. Dengan sinergi antara teknologi dan partisipasi aktif masyarakat, penanganan stunting di Kota Bandung menjadi lebih inklusif, di mana teknologi bertindak sebagai alat pendukung, sementara komunitas menjadi penggerak utama dalam implementasi di lapangan.

Evaluasi dampak dari kombinasi digitalisasi dan partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa pendekatan ini efektif dalam mengurangi angka stunting. Digitalisasi mempercepat identifikasi dan respon terhadap kasus gizi buruk, sementara peran komunitas memastikan keberlanjutan program melalui pendekatan yang kontekstual dan berbasis kebutuhan lokal. Oleh karena itu, sinergi antara teknologi dan masyarakat ini menjadi model inovasi kebijakan yang tidak hanya relevan untuk Kota Bandung, tetapi juga dapat direplikasi di wilayah lain yang menghadapi tantangan serupa.

KESIMPULAN

Kebijakan Pemerintah Kota Bandung dalam inovasi pencegahan dan penanganan stunting menunjukkan bahwa kota ini telah mengadopsi pendekatan berbasis kolaborasi dan teknologi untuk menangani tantangan kesehatan masyarakat. Program unggulan yang diterapkan oleh Dinas Kesehatan Kota Bandung, seperti penggunaan aplikasi e-Penting untuk digitalisasi data stunting, distribusi peralatan antropometri ke posyandu, dan kampanye edukasi berbasis komunitas, menunjukkan komitmen kuat dalam mengurangi prevalensi stunting. Upaya ini didukung oleh berbagai peraturan daerah, termasuk kebijakan berbasis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang sesuai dengan target capaian nasional.

Namun, terdapat tantangan signifikan yang perlu diatasi. Masalah kesenjangan sumber daya di tingkat masyarakat, keterbatasan kapasitas teknis di beberapa Puskesmas, dan kebutuhan koordinasi lintas sektor menjadi kendala utama. Evaluasi program juga menunjukkan bahwa meskipun inovasi

berbasis teknologi sangat membantu, keberlanjutan program memerlukan dukungan anggaran yang konsisten, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, dan keterlibatan lebih aktif dari semua pihak dalam pendekatan pentahelix.

Secara keseluruhan, strategi Kota Bandung dalam otonomi dan desentralisasi memberikan contoh positif bagaimana kebijakan lokal yang terarah dapat mendukung agenda nasional, meskipun keberhasilannya membutuhkan evaluasi dan penyempurnaan yang berkelanjutan.

SARAN

Untuk mencegah dan menangani stunting di Kota Bandung, diperlukan langkah-langkah konkrit dan terukur yang mengoptimalkan program yang ada sekaligus memperbaiki kekurangan. Salah satu langkah utama adalah meningkatkan edukasi gizi kepada masyarakat luas, khususnya ibu hamil, ibu menyusui, juga keluarga dengan balita. Pendekatan ini dapat diperluas melalui pemanfaatan media digital seperti aplikasi e-Penting yang sudah digunakan, serta penyebaran informasi melalui posyandu dan kegiatan berbasis komunitas. Edukasi yang konsisten tentang pentingnya gizi selama 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) diyakini dapat memperkuat upaya pencegahan.

Selain itu, penguatan kapasitas Puskesmas dan Posyandu sangat penting. Melengkapi fasilitas ini dengan pelatihan teknis dan alat antropometri yang modern dapat meningkatkan kemampuan deteksi dini masalah gizi. Di sisi lain, program ketahanan pangan yang menjamin akses masyarakat terhadap makanan bergizi perlu digalakkan, termasuk pelatihan pengelolaan sumber daya lokal untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga berisiko stunting.

Kolaborasi lintas sektor melalui pendekatan pentahelix yang melibatkan pemerintah, komunitas, akademisi, sektor swasta, dan media juga perlu diperkuat untuk memperluas cakupan dan efektivitas kebijakan. Upaya ini mendukung sinergi antar program serta meningkatkan dukungan publik terhadap program yang sudah berjalan. Evaluasi program menjadi elemen kunci, di mana keberhasilan program seperti e-Penting harus dinilai melalui dampak jangka panjangnya terhadap penurunan prevalensi stunting. Program-program yang kurang efektif perlu disesuaikan atau dihentikan untuk memastikan alokasi sumber daya yang optimal. Dengan pemantauan yang lebih intensif dan pelaporan berbasis data, kebijakan ini diharapkan dapat lebih terarah dan memberikan hasil yang signifikan bagi kesehatan masyarakat Kota Bandung.

DAFTAR PUSTAKA

- Antaranews. (2024). Pemkot Bandung ungkap prevalensi stunting capai 12,4 persen pada 2024. Diakses dari <https://www.antaraneews.com/berita/4449577/pemkot-bandung-ungkap-prevalensi-stunting-capai-124-persen-pada-2024>
- Dinas Kesehatan Kota Bandung. (n.d.). Profil Dinas Kesehatan Kota Bandung. Retrieved December 1, 2024, from <http://dinkes.bandung.go.id>.
- Pemerintah Kota Bandung. (2021). Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung. Bandung: Pemerintah Kota Bandung.
- Pemerintah Kota Bandung. (2016). Peraturan Walikota Bandung Nomor 1381 Tahun 2016 tentang

- Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Bandung. Bandung: Pemerintah Kota Bandung.
- Pemerintah Provinsi Jawa Barat. (2024). Kota Bandung optimis angka prevalensi stunting capai 14 persen tahun 2024. Diakses dari <https://jabarprov.go.id/berita/kota-bandung-optimis-angka-prevalensi-stunting-capai-14-persen-tahun-2024-11365>
- Yusuf, S. A., & Khasanah, U. (2019). Kajian literatur dan teori sosial dalam penelitian. Metode Penelitian Ekonomi Syariah, 80, 1-23.